

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dengan adanya kedua contoh tersebut tentang perlindungan data dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakatnya masih sangat kurang. Bahkan dari kedua sumber utama di atas tidak ada penjelasan atau solusi dari pemerintah terkait permasalahan kebocoran data. Padahal isu tentang perlindungan data merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan sistem demokrasi digital. Oleh karena itu sistem pengelolaan data harus diimbangi dengan aturan yang jelas untuk menghindari kebocoran data. Keamanan data tidak akan terjadi antara penggunaan *big data* selama tidak ada aturan atau undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi (Hisbulloh, 2021). Hal inilah yang menyebabkan kebocoran data akan terus terjadi.

Dengan adanya keterbatasan penelitian dalam bidang waktu, informasi dan juga struktur penulisan, tentu masih terdapat informasi yang masih belum tersampaikan dengan sempurna. Selain itu, penulis juga merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk membahas dan mengupas lebih lanjut tentang pelaksanaan demokrasi digital di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan data di media sosial Indonesia.